

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 /PRT/M/2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

ARAHAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAK

1. ISI RENCANA STRATEGIS DAK INFRASTRUKTUR PUPR



*) Diatur lebih lanjut didalam Modul Penyusunan Dokumen Renstra DAK Infrastruktur PUPR

2. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAK INFRASTRUKTUR

PERSIAPAN

- Kick off meeting
- Pembentukan tim
- Penyusunan agenda kerja tim
- Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

ANALISA TERKAIT KEBIJAKAN DAK

- Mereview RPJMN
- Mereview RPJMD
- Mereview Renstra SKPD terkait (untuk Kab/Kota)
- Menganalisis gap infrastruktur dan kebutuhan DAK
- Menganalisis prioritas nasional dan prioritas daerah

PERUMUSAN DRAFT RENSTRA DAK

- Mengidentifikasi kebijakan nasional
- Mengidentifikasinya visi dan misi kepala daerah terpilih (strategi dan kebijakan)
- Mengidentifikasinya isu-isu strategis pembangunan daerah, tujuan dan sasaran
- Menginventarisir rencana program dan kegiatan pada SKPD terkait

PENYUSUNAN DRAFT RENSTRA DAK

- Terumuskan kegiatan berdasarkan, Indikator kinerja, kriteria kegiatan, bidang, jenis dan menu DAK
- Terumuskan kebutuhan pendanaan 5 tahun kedepan
- Terumuskan prioritas kegiatan dan lokasi

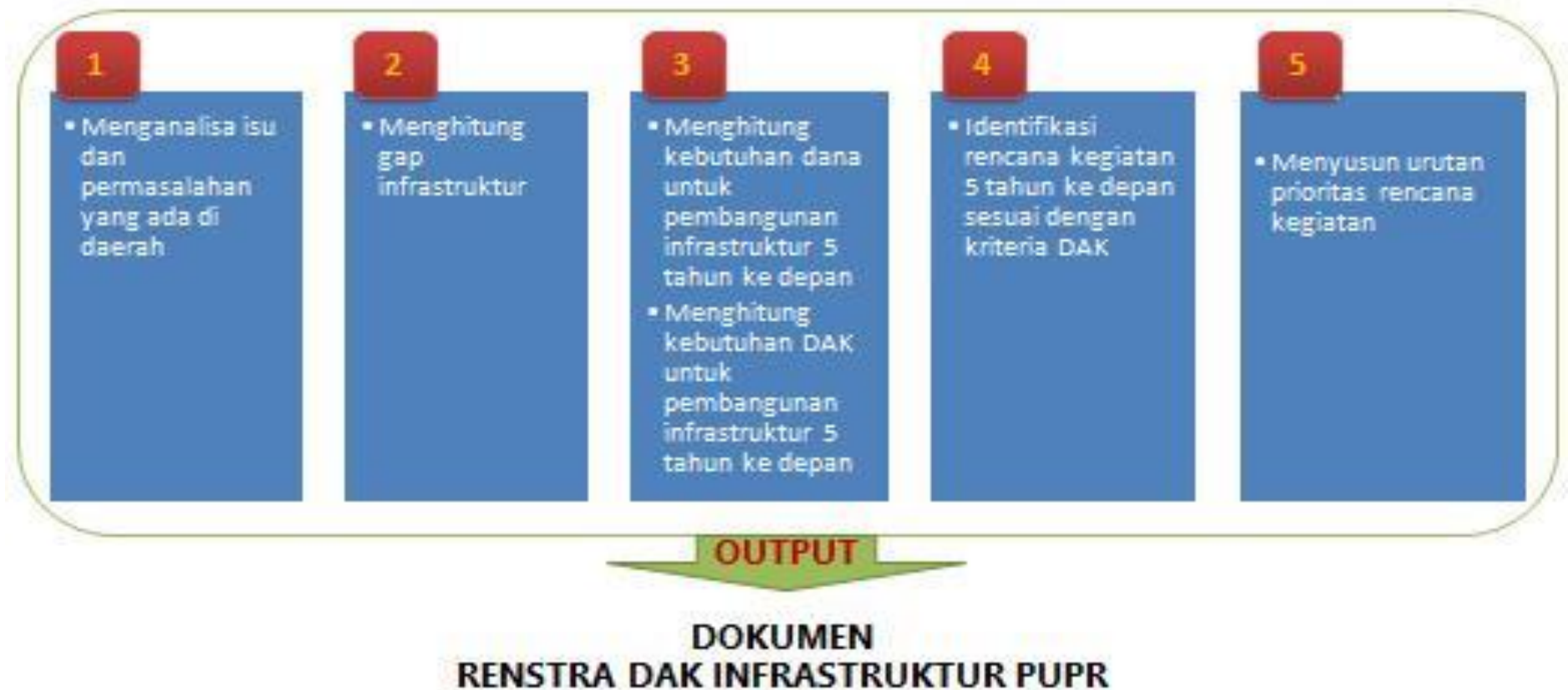
ALUR KOORDINASI PENYUSUNAN RENSTRA DAK INFRASTRUKTUR PUPR



*SKPD yaitu Dinas dan Bappeda

*) Diatur lebih lanjut didalam Modul Penyusunan Dokumen Renstra DAK Infrastruktur PUPR

3. MEKANISME PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS DAK (5 TAHUNAN)



*) Diatur lebih lanjut didalam Modul Penyusunan Dokumen Renstra DAK Infrastruktur PUPR

4. MENGANALISA ISU DAN PERMASALAHAN

1. REVIEW DOKUMEN

Daerah melakukan review dokumen terkait seperti RPJMD dan Renstra SKPD

2. IDENTIFIKASI ISU DAN PERMASALAHAN

Identifikasi isu dan permasalahan yang ada dalam RPJMD dan Renstra SKPD terkait infrastruktur PUPR (Bidang Jalan, Irigasi, Air minum, Sanitasi, Perumahan)

3. MENYARING ISU DAN PERMASALAHAN

Menyaring isu dan permasalahan terkait infrastruktur PUPR berdasarkan bidang, jenis dan menu, seperti :

- Isu dan permasalahan yang mendukung prioritas nasional
- Isu dan permasalahan yang mendukung SPM
- Isu dan permasalahan yang terkait daerah afirmasi

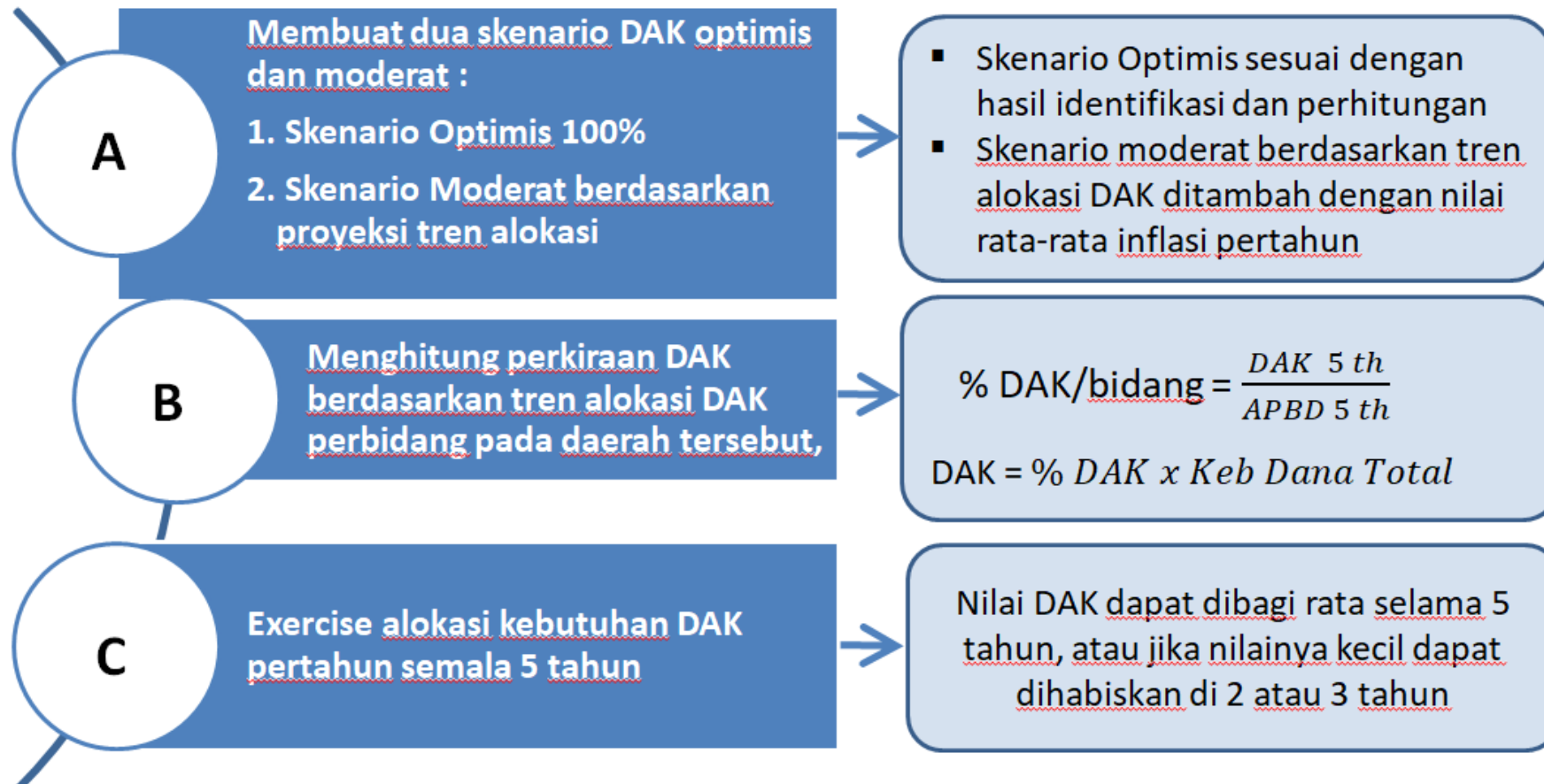
*) Diatur lebih lanjut didalam Modul Penyusunan Dokumen Renstra DAK Infrastruktur PUPR

5. LANGKAH – LANGKAH MENENTUKAN GAP INFRASTRUKTUR DAN PENDANAAN



*) Diatur lebih lanjut didalam Modul Penyusunan Dokumen Renstra DAK Infrastruktur PUPR

6. MENGHITUNG KEBUTUHAN DAK 5 TAHUN KEDEPAN



*) Diatur lebih lanjut didalam Modul Penyusunan Dokumen Renstra DAK Infrastruktur PUPR

7. IDENTIFIKASI RENCANA KEGIATAN 5 TAHUN SESUAI KRITERIA DAK



*) Diatur lebih lanjut didalam Modul Penyusunan Dokumen Renstra DAK Infrastruktur PUPR

8. MENYUSUN URUTAN PRIORITAS RENCANA KEGIATAN



*) Diatur lebih lanjut didalam Modul Penyusunan Dokumen Renstra DAK Infrastruktur PUPR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

JDIH Kementerian PUPR